

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Sabtu Tanggal: 08 Mei 2021 Halaman: 1 ► ANTISIPASI PERSEBARAN COVID-19 Pemda DIY Kesulitan Larang Mudik Lokal baru mengetahui larangan tersebut dari media massa. Namun Baskara Aji mengaku kesulitan menrapkan aturan tersebut.
"Bagimana kami membatasi orang dari Bantul ke Kota. Dalane ana pira [jalannya saja ada berapa], yang jalam kaki saja bisa. Terus terang kala uitu dilaksanakan sulit. Kata Baskara Ali. di kompleks JOGJA—Pemda DIY mengaku kesulitan menerapkan aturan larangan mudik lokal. Jika aturan itu sudah menjadi keputusan Pemerintah Pusat, Pemda DIY akan mengikutinya. Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Alimengrakan sampi sast ini Aji, mengatakan sampai saat ini Pemda DIY belum menerima regulasi kata Baskara Aii, di kompleks tapi Gunungkidul, Bantul, Sleman, Kota enggak bisa dibatasi." Kepatihan, Jumat (7/5).

Pemda DIY tidak mungkin menjaga
di semua pintu masuk dan keluar larangan mudik lokal secara tertulis dari Pemerintah Pusat atau dari Satuan nanganan Covid-19 nasional. Ia Pemda DIY... "Hanya Kulonprogo [yang bisa dibatasi], kecuali dia renang saja begitu [renang di Sungai Progo]. Kalau yang lain tiga kabupaten satu kota rasanya sulit dibatasi," ujar Baskara Aji. Namun demikian Pemda Jusa belum tahu aglomerasi seperti belum tahu tahu aglomerasi se mudik di wilayah aglomerasi ini juga tak bakal efektif mengingat banyaknya pekerja dari luar Jakarta. banyaknya pekerja dari luar Jakarta.

"Enggak akan efektif itu. Apalagi ada aglomerasi. Lha gimana mau efektif ada yang kerja di Jakarta tapi rumah di Depok; rumah di Bekasi. Ya enggak bisalah. Yang bisa itu kantornya tutup," kata Agus saat dihubungi, Jumat.
"Gimana yang kerja di toko, di restoran kan enggah bisa dia harus masuk," ujannya.

Ia menjelaskan kebijakan (policy) harus dianalisa dengan baik. Namun. dia melihat kebijakan laran gan mudik lokal ini tidak jelas. Policy itu harus dilakukan lewat analisa yang baik. Maksudnya enggak jelas. Tapi membuat susah orang. Kan kebijakan itu dibuat oleh negara supaya orang mudah keterangan tertulis atau laimnya.
Lantaran pada larangan mudidi6-17 Mei 2021, masih banyak
pekerja yang belum libuSementara para pekerja sektor
logistik banyak yang berasal dari Sleman, Bantul, Gunungkidul,
atau Kulonprogo. "Apakah
langsung libur atau seperti
apa, kami masih menelusuri
kebijakan ini," kata Heroe.
"Kami tunggu aturan teknis
yang benar seperti apa."
Sebagai gambaran, aglomerasi
merupakan kota atau kabupaten
yang berada dalam kawasan mengeluarkan kebijakan lanjutan. Namun jika dalam bentuk larangan akan dilaksanakan semaksimal mungkin. larangan akan dilaksanakan semaksimal mungkin. Salah satunya bekerja sama dengan kalurahan dan RT/RW untuk mengatur warganya yang keluar masuk dari rumah. "Kalau itu memang keharusan kami akan sampalkan ke lurah, RT/RW untuk membatasi supaya pada saat keluar dari RT/RW sudah ada rambu-rambu karena tidak boleh keluar," ujar Baskara Aji. Sebagaimana diketahui Pemerintah Pusat resmi melarang semua jenis mudik selama masa larangan mudik dari 6-17 Mei 2021. Larangan mudik tersebut juga berlaku bagi daerah aglomerasi, termasuk DT/Yang sebelumnya sempat diizinkan atau dibolehkan mudik lokal. kan kebijakan itu dibuat oleh negara supaya orang mudah melakukan kegiatan seharihari," ungkapnya.
Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman menyebut kebijakan larangan aglomerasi ini jelas. Namun visibilitasnya tak memadai. Sebab, saat ini udah H- Lebaran. "Kebijakannya jelas. Cuma visibilitasnya enggak memadainya. Karena ini sudah H-4," kata Dicky.
Menurutnya lurangan mudik lokal ini sukar diterapkan. "Enggak mungkin kita me akukan ini tuh. Efektivitasnya kecil. Karena banyak yang pasti melanggar. Padahal yang berada dalam kawasan pengembangan wilayah per-kotaan. Meski Pemerintah Pusat telah melarang mudik, kegiatan ekonomi di wilayah aglomerasi masih diperbolehkan. Jogia dan empat kabupaten di Provinsi DIY termasuk satu dari delapan wilayah aglomerasi yang diperbolehkan lakukan aktivitas ekonomi. Masih Mengkaji
Sementara itu, Pemerintah Kota
Jogja masih mengkaji larangan
mudik lokal. Wakil Wali Kota
Jogja, Heroe Poerwadi, belum
mendapat keterangan tertuk
mendapat keterangan tertuk
sejakawal memangaudah tidak
sejakawal memangangap larangan yang pasti melanggar. Padahal yang harus dilakukan mitigasi saja. Selain terus mempersuasi penduduk," ujarnya. (Detik)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 27 April 2024 Kepala